KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

LAPORAN KINERJA 2022

BPMP

PROVINSI SUMATERA UTARA

JUJUR ADALAH AWAL BERANTAS KORUPSI
BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA

STOP KORUPSI MENUJU WBK & WBBM
ZONA INTEGRITAS

BERANI JUJUR HEBAT!
BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN KINERJA

BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA

SIAP BERSIH MELAYANI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 menetapkan dua sasaran dan empat indikator kinerja. Secara umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022.

Medan, 27 Januari 2023
Kepala,

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. Irwan Safii, M.Pd.
NIP 196512311992031014

NILAI SAKIP
BPMP
PROVINSI SUMATERA UTARA
2019 - 2022

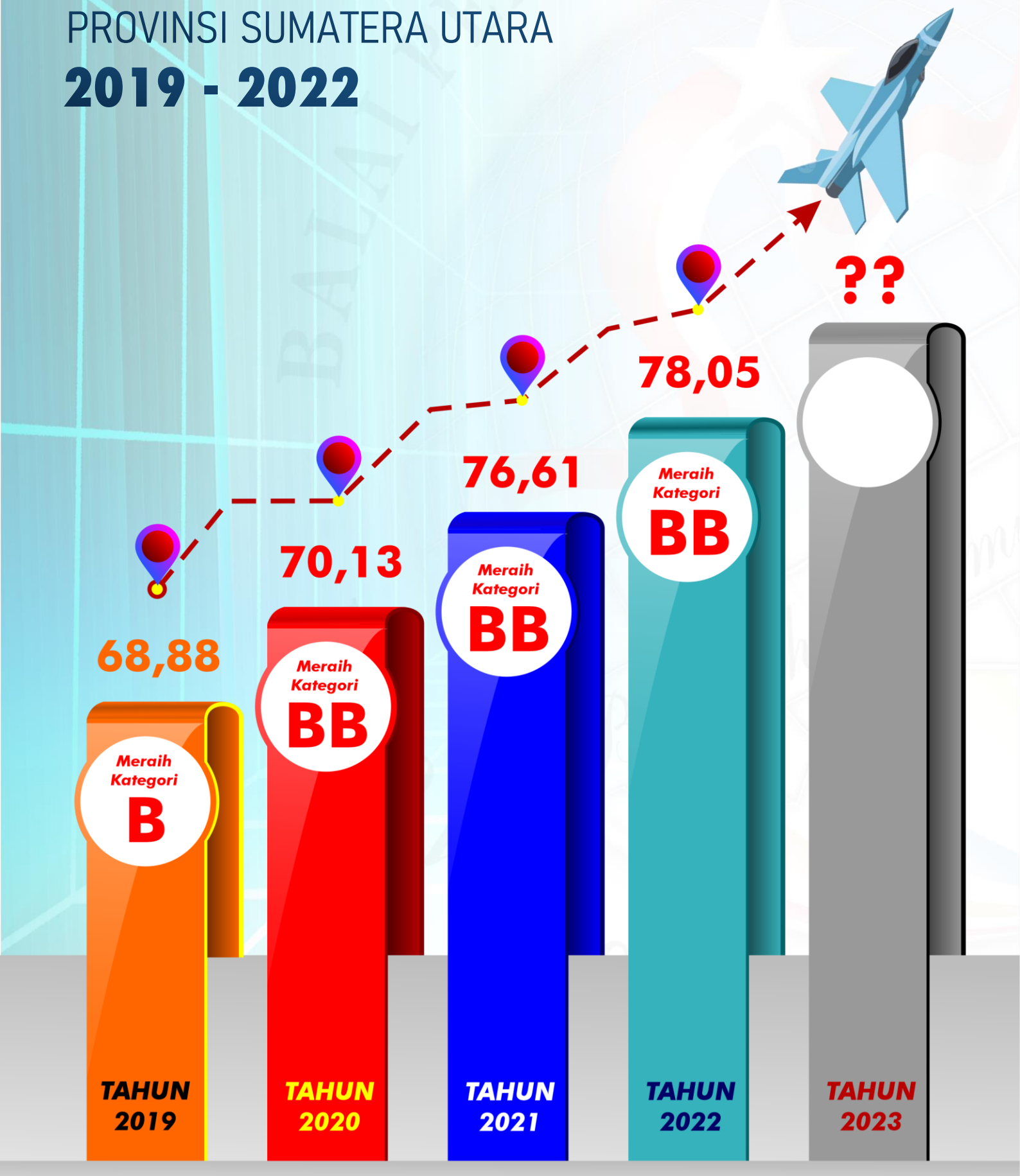

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

NILAI SAKIP BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR GRAFIK vii

IKHTISAR EKSEKUTIF viii

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Gambaran Umum 2

B. Dasar Hukum 4

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi 5

D. Isu-isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA **8**

A. Perencanaan Kinerja 9

B. Perjanjian Kinerja 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **15**

A. Capaian Kinerja 16

B. Realisasi Anggaran 33

C. Inovasi, Penghargaan dan Program *Cross cutting/Collaborative*..... 35

BAB IV PENUTUP **38**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 3

Tabel 1.2. Data SDM PPNPN BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 3

Tabel 2.1. Tujuan Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara Periode Perencanaan Tahun 2020-2024 10

Tabel 2.2. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara 11

Tabel 2.3. Rincian Revisi Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 12

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Awal BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 12

Tabel 2.5. Pagu Anggaran Awal BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 13

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Akhir BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 13

Tabel 2.7. Pagu Anggaran Akhir BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 14

Tabel 3.1. Capaian Kinerja 16

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.1 18

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.2 19

Tabel 3.4. Progres Capaian Rapor Pendidikan 21

Tabel 3.5. Capaian PMM x IKM 25

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 2.1 27

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Anggaran 30

Tabel 3.8. Alokasi, Realisasi dan Persentase Daya Serap Anggaran 33

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Perjenis Belanja 34

Tabel 4.1. Capaian Kinerja 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Sejarah BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 2

Gambar 1.2. Beban Kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara 4

Gambar 1.3. Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Utara 6

Gambar 3.1. Rekapitulasi login platform rapor pendidikan Desember 2022 22

Gambar 3.2. Rekapitulasi Eksplorasi Platform Rapor Pendidikan Desember 2022 ... 22

Gambar 3.3. Rekapitulasi Unduh Rapor Pendidikan Desember 2022 23

Gambar 3.4. Rekapitulasi Unduh Rekomendasi Pbd Desember 2022 23

Gambar 3.5. Capaian IKK.2.2 30

Gambar 3.6. Tangkapan layar Aplikasi Spasikita 31

Gambar 3.7. Inovasi Pelaksanaan Advokasi 35

Gambar 3.8. Penyerahan Penghargaan Anugerah Kihajar Tahun 2022 36

Gambar 3.9. Dokumen Nota Kesepakatan 37

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Capaian Peringkat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara 28

Grafik 3.2. Capaian Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara 31

Grafik 3.3. Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2022 33

Grafik 3.4. Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Realisasi Jenis Belanja ... 34

Ikhtisar EKSEKUTIF

Laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian dua sasaran dengan empat indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Secara umum, capaian kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

IKK 1.1. Persentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

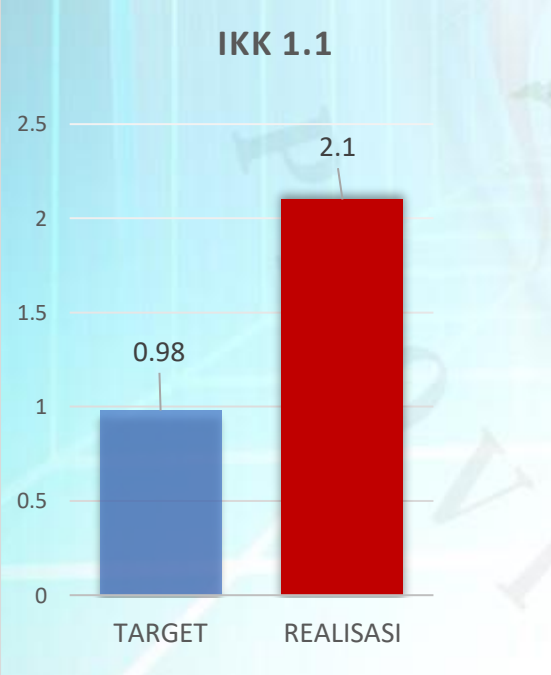

Menggunakan data akreditasi 2021-2022 (sumber data dari BAN PAUD dan PSKP BSKAP) diperoleh data sebagai berikut:

Realisasi IKK 1.1 adalah 2,12% dari target sebesar 0,98% sehingga capaian kinerja = 216,33%.

IKK 1.2. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

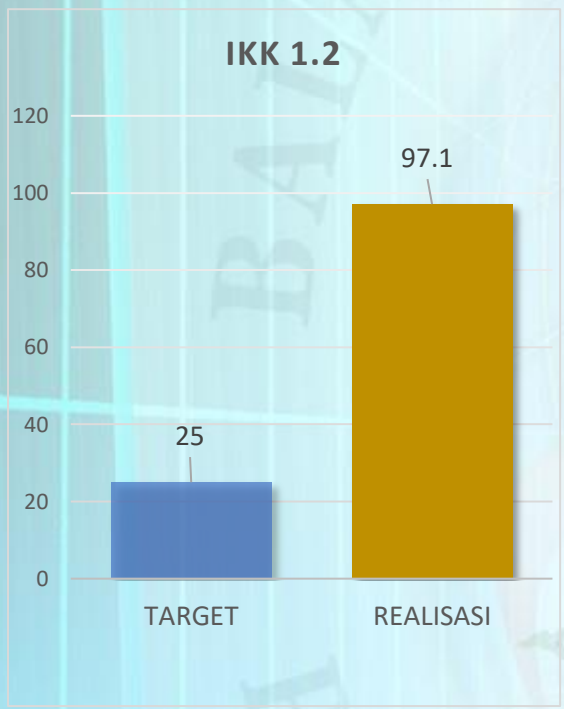

Menggunakan data akreditasi 2021-2022 (sumber data dari BAN SM) diperoleh data sebagai berikut:

Realisasi IKK 1.2 adalah 97,1% dari target sebesar 25% sehingga capaian kinerja = 388,40%.

IKK 2.1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	
Target	A
Realisasi	BB
Dengan Interpretasi	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

IKK. 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

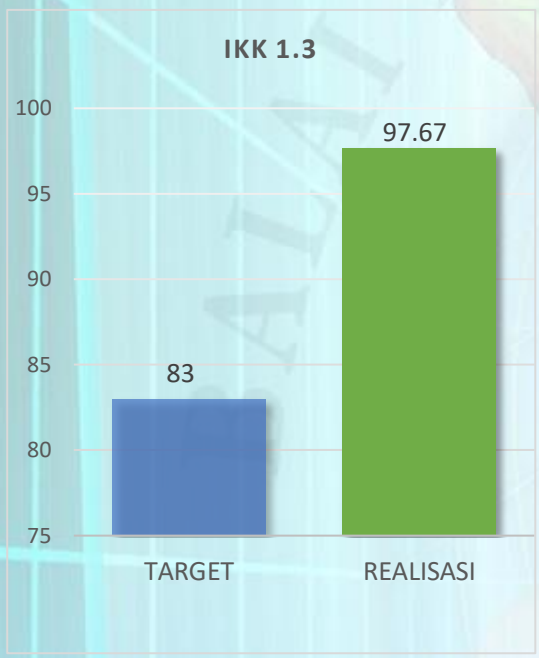

Nilai EKA = 98,83 dan nilai IKPA = 95,92 sehingga Nilai Kinerja Anggaran tahun 2022 = 97,67

Target yang tertera di Perjanjian Kinerja adalah 83.

Dengan demikian capaian kinerja adalah sebesar 117,67%

Realisasi Anggaran

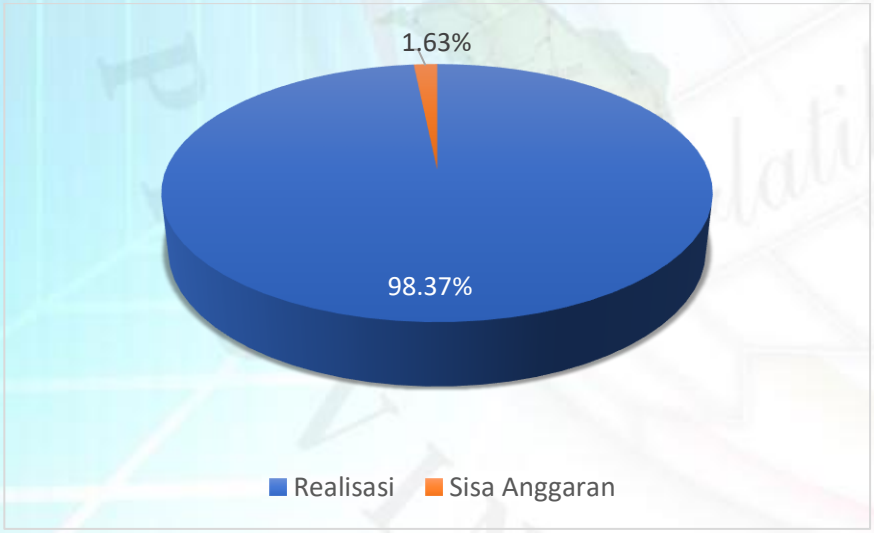

Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Daya Serap
Rp 34.764.132.000	Rp 34.196.610.038	98,37%

Hambatan	Solusi
Rendahnya aktivasi akun belajar.id pada satuan pendidikan jenjang PAUD	Melakukan advokasi kepada Dinas Pendidikan untuk mendorong aktivasi akun belajar.id di satuan pendidikan jenjang PAUD
Masih banyak satuan pendidikan jenjang PAUD belum melakukan pengisian lembar data EDS untuk Perencanaan Berbasis Data dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)	Melakukan pendampingan ke satuan pendidikan jenjang PAUD dalam pengisian lembar data EDS untuk Perencanaan Berbasis Data dalam penyusunan RKAS
Mayoritas Pemerintah Daerah belum memanfaatkan rapor pendidikan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan rapor pendidikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Sebagian besar Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah belum memanfaatkan rapor pendidikan dalam menyusun RKAS	Melakukan bimbingan teknis kepada satuan pendidikan untuk memanfaatkan rapor pendidikan dalam menyusun RKAS
Hasil pengukuran kinerja pegawai belum dijadikan dasar untuk pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai/kelompok kerja	Pemberian *reward* dan *punishment* berdasarkan kinerja pegawai dengan melakukan evaluasi secara berkala
Terbatasnya jumlah SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai kompetensi dalam perbendaharaan	Mengikutsertakan SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara pada kegiatan pelatihan Pejabat Perbendaharaan untuk mendapatkan SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di bidang perbendaharaan
Belum efektifnya peran Satuan Pengawas Internal (SPI) di BPMP Provinsi Sumatera Utara	Meningkatkan kompetensi Tim SPI agar dapat menjalankan fungsi kepengawasannya

Laporan Kinerja 2022

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organsasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Sejak April 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Drs. Irwan Safii, M.Pd.

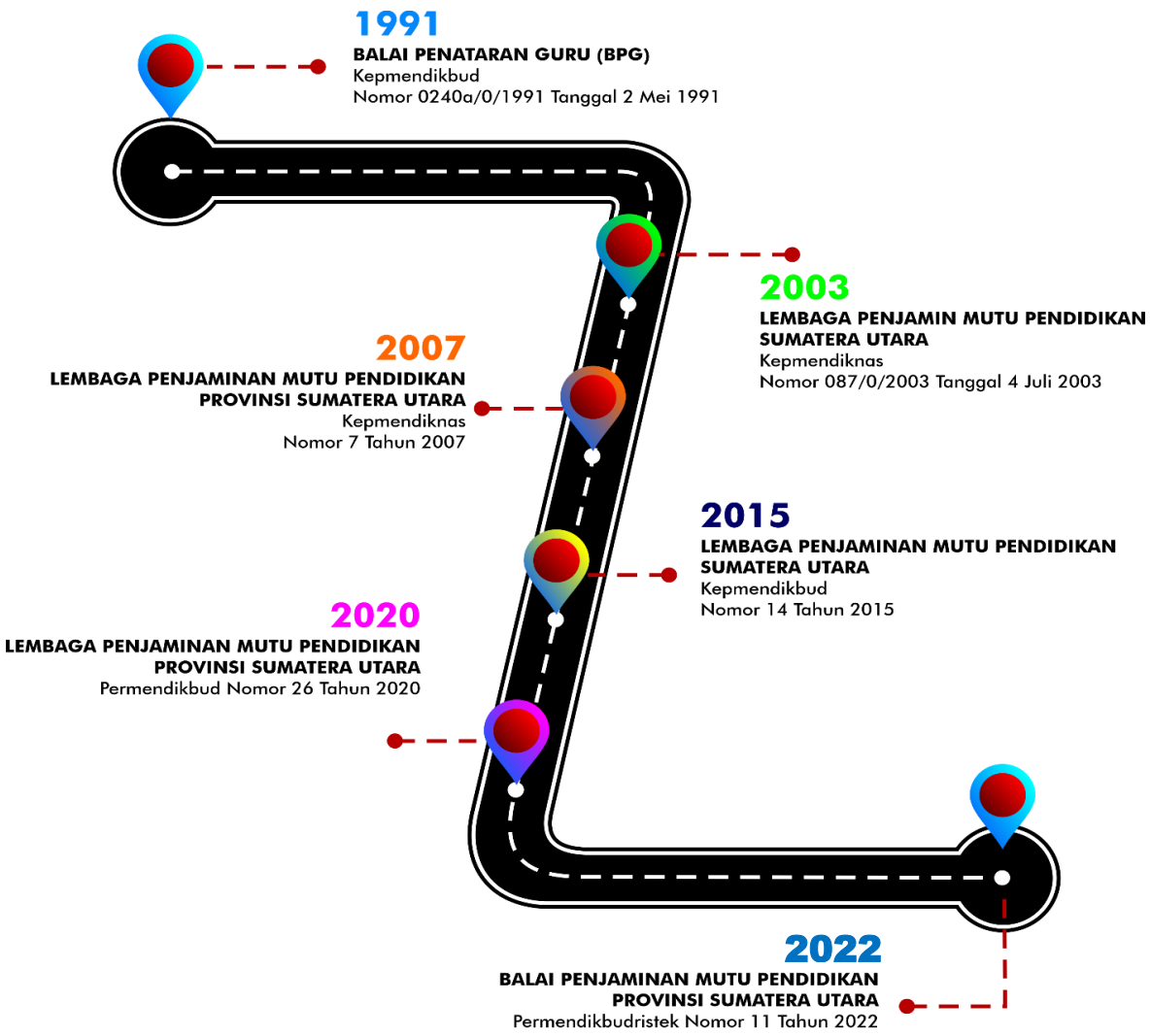

Gambar 1.1. Sejarah BPMP Provinsi Sumatera Utara

Gambaran SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2022, BPMP Provinsi Sumatera Utara mempunyai pegawai sebanyak 157 orang yang terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional widyaprada, jabatan fungsional umum dan PPNPN.

Tabel 1.1.
Data SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2022

No	Uraian	Pendidikan					Golongan				Kelamin		Jumlah
		≤ SMA	D3	S-1	S-2	S3	I	II	III	IV	LK	PR	
1	Kepala BPMP	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
2	Kepala Subbagian Umum	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
3	Widyaprada	-	-	-	10	1	-	-	3	8	5	6	11
4	Pegawai/Staf	6	1	28	31	-	-	1	43	22	34	32	66
5	CPNS		5					5			3	2	5
Jumlah													**84**

Tabel 1.2.
Data SDM PPNPN BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2022

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1	PPNPN Pramubakti	5	9	14
2	PPNPN Keamanan	18	2	20
3	PPNPN Kebersihan	29	7	36
4	PPNPN Pengemudi	3	0	3
	Jumlah	**55**	**18**	**73**

Sumber data : Kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Utara

Beban Kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara

Jumlah wilayah Administrasi :	
Kabupaten	: 25
Kota	: 8
Kecamatan	: 450
Kelurahan	: 693
Desa	: 5417

250.273 PTK		
PAUD	:	27.150
PKBM	:	1.650
SKB	:	282
SD	:	117.805
SMP	:	51.271
SMA	:	27.617
SMK	:	23.580
SLB	:	918

23.785 Sekolah		
PAUD	:	8.690
PKBM	:	477
SKB	:	22
SD	:	9.788
SMP	:	2.696
SMA	:	1.075
SMK	:	977
SLB	:	60

3.199.361 Siswa		
PAUD	:	266.265
PKBM	:	50.746
SKB	:	4.595
SD	:	1.547.023
SMP	:	629.106
SMA	:	385.738
SMK	:	310.474
SLB	:	5.414

Sumber : https://dapo.kemdikbud.go.id/ *Data Desember 2022*

Gambar 1.2. Beban Kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PermenPAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

8. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

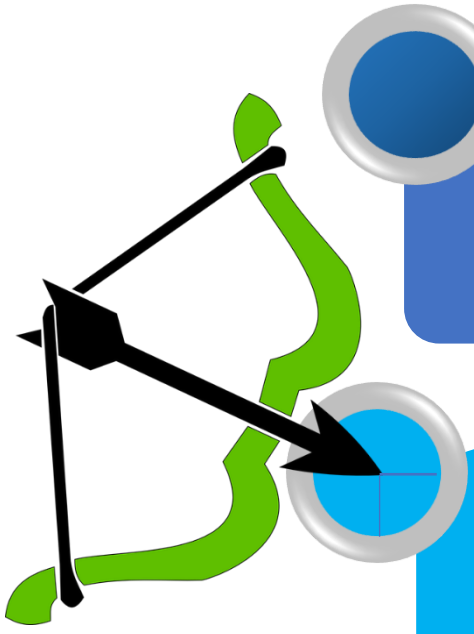

TUGAS BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA

Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara

FUNGSI BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat;
2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat;
3. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat ;
6. Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat;
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

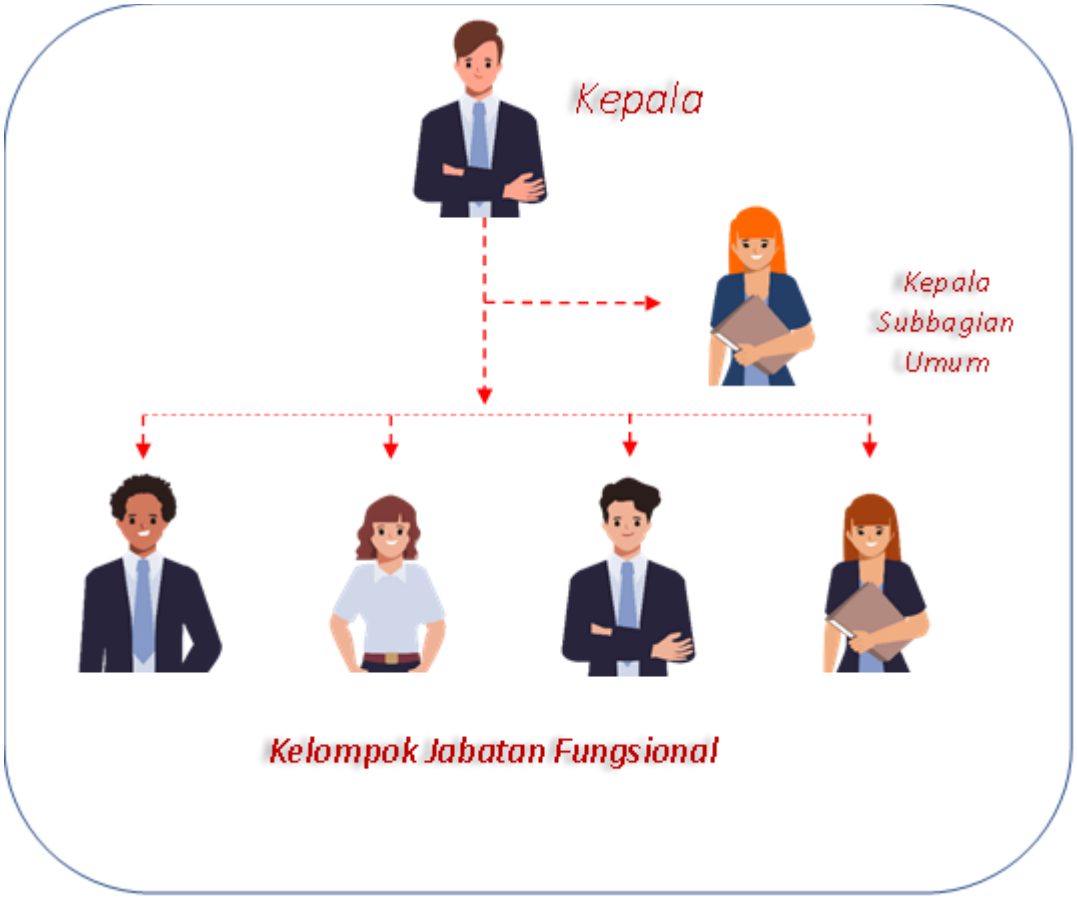

Gambar 1.3. Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022.

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Permasalahan/Isu-isu Strategis

a. Sebagian besar pemerintah daerah belum memiliki regulasi dan anggaran untuk kelanjutan Program Sekolah Penggerak;
b. Belum optimalnya pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) di Satuan Pendidikan;
c. Masih banyak Satuan Pendidikan yang belum memahami Implementasi Kurikulum Merdeka;
d. Masih banyak Pemerintah Daerah belum memanfaatkan rapor pendidikan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Masih banyak Satuan Pendidikan belum memanfaatkan rapor pendidikan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah;
f. Sebagian besar Satuan Pendidikan belum bisa melaksanakan ANBK secara mandiri;
g. Angka Partisipasi *(Participation Rate)* ANBK di provinsi Sumatera Utara masih tergolong rendah;

h. Rendahnya aktivasi akun belajar.id jenjang PAUD;
i. Rendahnya satuan pendidikan jenjang PAUD yang melakukan pengisian lembar data EDS untuk Perencanaan Berbasis Data dalam penyusunan RKAS.

2. Peran Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek, BPMP Provinsi Sumatera Utara mempunyai peran strategis dalam melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan antara lain :

1. Menyukseskan Program Sekolah Penggerak dengan cara mendorong Pemerintah Daerah menerbitkan regulasi untuk mendukung Program Sekolah Penggerak dalam bentuk :
   a. Peraturan Kepala Daerah;
   b. Surat Edaran Kepala Dinas;
   c. Alokasi anggaran;
2. Mempercepat implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten/Kota melalui advokasi ke Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi agar mendorong Satuan Pendidikan :
   a. Mendaftar sebagai pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri;
   b. Memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar;
   c. Membentuk Komunitas Belajar;
   d. Berbagi praktik baik;
3. Optimalisasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui fasilitasi dan penguatan strategi pengimbasan serta berbagi praktik baik di PMM;
4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menggunakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dengan melakukan advokasi ke Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
   a. Berpartisipasi dalam musrenbang Kabupaten/Kota/Provinsi;
   b. Pendampingan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi;
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) menggunakan PBD dengan melakukan Bimbingan Teknis ke Satuan Pendidikan;
6. Penuntasan berbagai permasalahan pendidikan melalui pertemuan yang dilakukan secara periodik dalam bentuk kegiatan Pokja Manajemen Operasinal (PMO) dan;
7. Verifikasi dan validasi kesiapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Satuan Pendidikan untuk pelaksanaan ANBK.

Laporan Kinerja 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, revisi 28 Juli 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinekaan global.

Misi :

BPMP Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan misi yang juga merupakan penyelenggaraan fungsi sesuai Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
b. Melakukan pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
c. Melaksanakan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
d. Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
e. Melakukan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
g. Melaksanakan urusan administrasi.

BPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan dua tujuan strategis yang akan dicapai untuk periode perencanaan 2020-2024.

Tabel 2.1.
Tujuan Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara Periode Perencanaan 2020-2024

Tujuan Strategis 1	**Indikator Kinerja Tujuan**	**Target 2024**
Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Utara.	1. Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.	3,92%
	2. Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).	35%
Tujuan Strategis 2	**Indikator Kinerja Tujuan**	**Target 2024**
Terwujudnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara yang berkualitas.	1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.	A
	2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.	85%

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada setiap tahunnya.

Tabel 2.2

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			Satuan	*2020/2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD, Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	-	0,98	1,98	3,92
		1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	-	25	30	35
2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BPMP Provinsi Sumatera Utara	2.1 Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara	Predikat	BB	A	A	A
		2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai	82	83	84	85

** Tahun 2020 dan 2021 masih menggunakan Rapor Mutu Pendidikan*

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 mengalami revisi atau perubahan sebanyak dua kali sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Revisi Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No.	Perjanjian Kinerja	Tanggal Terbit	Rincian Revisi PK
1.	Perjanjian Kinerja awal	28 Maret 2022	Perjanjian Kinerja awal dengan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen.
2.	Perjanjian Kinerja revisi ke-1	14 Juli 2022	a. Perubahan nomenklatur yang semula LPMP Provinsi Sumatera Utara menjadi BPMP Provinsi Sumatera Utara; b. Perubahan penandatangan dari BPMP Provinsi Sumatera Utara yang semula Afrizal Sihotang, S.T., M.Si menjadi Drs. Irwan Safii, M.Pd dan dari Unit Eselon I yang semula Jumeri, S.TP., M.Si menjadi Dr. Iwan Syahril, Ph.D. c. Penambahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.
3.	Perjanjian Kinerja revisi ke-2 (Akhir)	27 Desember 2022	Perubahan alokasi anggaran.

B.1. Perjanjian Kinerja Awal

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Awal BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	83

Tabel 2.5.
Pagu Anggaran Awal BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	23.603.916.000
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	7.969.592.000
TOTAL		**31.573.508.000**

B. 2. Perjanjian Kinerja Akhir

Tabel 2.6.
Perjanjian Kinerja Akhir BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
	[IKK 1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	83

Tabel 2.7.
Pagu Anggaran Akhir BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	22.012.124.000
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	12.752.008.000
TOTAL		**34.764.132.000**

Laporan Kinerja 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menetapkan dua sasaran dengan empat indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0,98%	2,12%	216,33%
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25%	97,1%	388,40%
Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	A	BB	-
Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	83	97,67	117,67

A.1. Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Ketercapaian Sasaran Kegiatan terkait meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen belum dapat dilakukan perhitungan berdasarkan rapor pendidikan. Hal ini disebabkan belum tersedianya data hasil Asesmen Nasional (AN) dan Survey Lingkungan Belajar Tahun 2022.

Berdasarkan data akreditasi 2021-2022 (sumber data dari BAN PAUD dan PSKP BSKAP) diperoleh data sebagai berikut:

a. persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya mencapai 2,12% dari target sebesar 0,98%.
b. Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) mencapai 97,1% dari target sebesar 25%.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Definisi :

Persentase dari satuan PAUD dan Dikmas di wilayah masing-masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar.

Metode Penghitungan:

$$= \frac{\textit{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas yang rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar meningkat}}{\textit{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas pada Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \textit{ x 100\%}$$

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.1

Tahun 2021	Tahun 2022					Tahun 2024 (Akhir Renstra)	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja BPMP dibanding Nasional	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
-	0,98	2,12	216,33%	2,96	71,62%	3,92	54,08%

IKK1.1. merupakan target kinerja yang baru dimulai dari bulan Juli 2022 bagi BPMP Provinsi Sumatera Utara sehingga belum ada kegiatan yang terkait langsung untuk pencapaian target IKK.1.1. ini.

Program dan Kegiatan Pendukung

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 dalam upaya mendukung pencapaian target IKK. 1.1 ini antara lain:

a. Bimbingan Teknis PAUD berkualitas bagi pegawai BPMP Provinsi Sumatera Utara;
b. Monitoring dan Evaluasi keterlaksanaan PAUD berkualitas;
c. Kegiatan pendampingan lingkungan belajar berkualitas jenjang PAUD.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Definisi :
Persentase dari provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing-masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya.

Metode Penghitungan:

$$= \frac{\textit{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor pendidikannya meningkat}}{\textit{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen pada Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \textit{ x 100\%}$$

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.2

Tahun 2021	Tahun 2022					Tahun 2024 (Akhir Renstra)	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja BPMP dibanding Nasional	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
-	25	97,1	388,4%	88,5	109,71	35	277,43

Pengukuran IKK 1.2 menggunakan data akreditasi 2021-2022 (sumber data dari BAN PAUD dan BSKAP). Digunakannya data akreditasi ini karena rapor pendidikan hasil Asesmen Nasional (AN) dan Survey Lingkungan Belajar tahun 2022 belum dirilis oleh BSKAP. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, ada sebanyak 33 kabupaten/kota/provinsi dari sejumlah 34 kabupaten/kota/provinsi yang meningkat nilai akreditasinya di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Dengan demikian terdapat 97,1% kabupaten/kota/provinsi yang meningkat akreditasinya.

Program dan Kegiatan Pendukung

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 dalam upaya mendukung pencapaian target IKK. 1.2 ini antara lain:

1. Program Sekolah Penggerak (PSP)

a. Capaian :

1) Jumlah satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak di Sumatera Utara adalah sebanyak 749 terdiri dari Sekolah Penggerak Angkatan I sebanyak 164, Sekolah Penggerak Angkatan II sebanyak 385 dan sekolah penggerak angkatan 3 sebanyak 200;
2) Sebanyak 33 Kepala Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 25 Bupati dan 8 Walikota se Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Mendikbudristek untuk mengimplementasikan PSP di daerahnya masing-masing khususnya jenjang PAUD, SD dan SMP;
3) Sebanyak 34 Kepala Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi telah menyatakan komitmen untuk mendukung program sekolah penggerak melalui video dukungan;
4) Sebanyak 34 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi se Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program Sekolah Penggerak dengan Mendikbudristek untuk mengimplementasikan PSP di daerahnya masing-masing;
5) Sebanyak 34 Kepala Dinas Pendidikan Kabupten/Kota/Provinsi telah menerbitkan SK Pokja Manajemen Operasional (PMO) dan telah melaksanakan pertemuan untuk membahas permasalahan dan solusi yang terjadi pada sekolah penggerak.

b. Permasalahan :

1) Masih ada daerah yang menganggap PSP adalah program pemerintah pusat (Kemendikbudristek);
2) Hanya beberapa daerah yang mengalokasikan anggaran atau *sharing* dana untuk mendukung PSP di daerahnya;
3) Belum terlihat daerah yang memiliki program khusus secara berkesinambungan dalam perencanaannya untuk menyukseskan program sekolah penggerak;
4) Masih sedikitnya apresiasi pemerintah daerah kepada sekolah penggerak yang ada di daerahnya masing-masing;
5) Masih ada kepala daerah yang memutasi kepala sekolah penggerak yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam Kepmendikbudristek Nomor 371/M Tahun 2021 Tentang PSP bahkan ada kepala sekolah yang diberhentikan dari Kepala Sekolah Penggerak (*Non Job*);
6) Belum terlihat persiapan Pemerintah Daerah untuk *hand over* atau pindah tangan pengelolaan PSP dari Kemendikbudristek setelah tiga tahun pelaksanaan PSP khususnya Kabupaten/Kota sasaran PSP Angkatan I;
7) Fasilitator Sekolah Penggerak belum sepenuhnya memahami tugasnya terlihat dari banyaknya permasalahan pada sekolah penggerak yang dieskalasinya merupakan permasalahan yang menyangkut sarana dan prasarana, kekurangan SDM dan keuangan/anggaran yang sulit diselesaikan pada tingkatan PMO Daerah maupun PMO Pusat karena bukan menjadi wewenangnya ataupun regulasinya tidak mendukung;
8) Belum semua Kordinator Fasilitator Sekolah Penggerak dari BBGP Provinsi Sumatera Utara sebagai Narasumber ikut terlibat dalam penyajian permasalahan Sekolah Penggerak yang dieskalasi oleh Fasilitator Sekolah Penggerak baik pada Rapat Persiapan PMO maupun pada Rapat PMO Daerah Bulanan.

2. Perencanaan Berbasis Data (PBD)

Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan, dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

Perencanaan Berbasis Data (PBD) bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret. Selain itu Perencanaan Berbasis Data (PBD) juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas pendidikan berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform Rapor Pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan . Terdapat tiga langkah sederhana dalam proses Perencanaan Berbasis Data (PBD) yaitu Identifikasi, Refleksi dan Benahi (IRB).

a. Capaian

Capaian Akses Rapor Pendidikan sampai dengan bulan Desember 2022 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Progres Capaian Rapor Pendidikan

1) Capaian Satuan Pendidikan Login Rapor Pendidikan :

Sudah Login		Belum Login		Total
Jumlah Sekolah	Persen	Jumlah Sekolah	Persen	
14,932	63.51%	8,581	36.49%	23,513

2) Capaian Satuan Pendidikan Eksplorasi Rapor Pendidikan:

Sudah Eksplorasi		Belum Eksplorasi		Total
Jumlah Sekolah	Persen	Jumlah Sekolah	Persen	
11,456	48.72%	12,057	51.28%	23,513

3) Capaian Satuan Pendidikan Unduh Rapor Pendidikan:

Sudah Unduh		Belum Unduh		Total
Jumlah Sekolah	Persen	Jumlah Sekolah	Persen	
14,033	59.68%	9,480	40.32%	23,513

4) Capaian Satuan Pendidikan Unduh Rekomendasi PBD:

Sudah Unduh		Belum Unduh		Total
Jumlah Sekolah	Persen	Jumlah Sekolah	Persen	
9,902	42.11%	13,611	57.89%	23,513

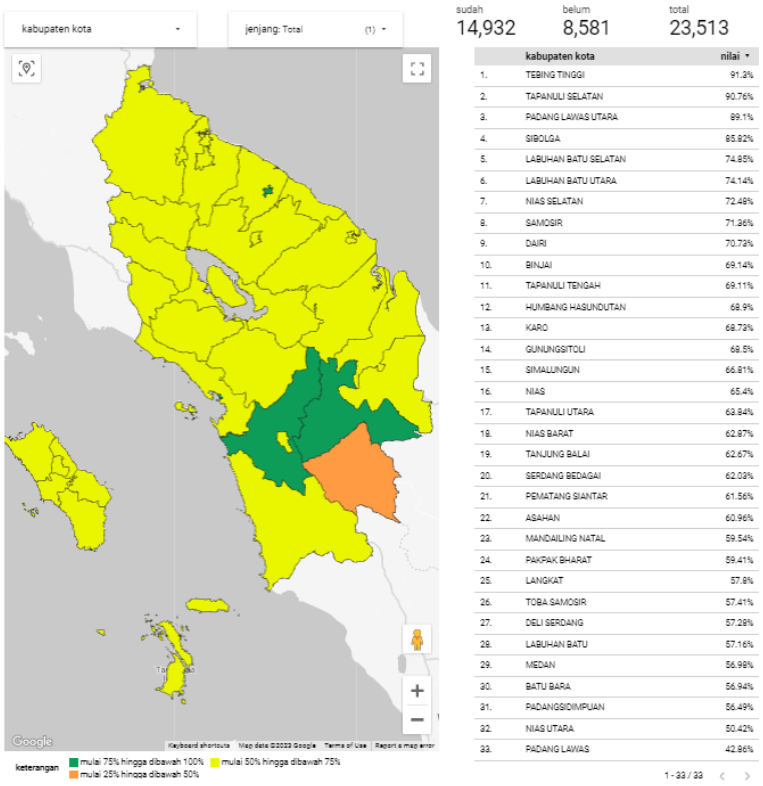

	kabupaten kota	nilai
1.	TEBING TINGGI	91.3%
2.	TAPANULI SELATAN	90.76%
3.	PADANG LAWAS UTARA	89.1%
4.	SIBOLGA	85.82%
5.	LABUHAN BATU SELATAN	74.85%
6.	LABUHAN BATU UTARA	74.14%
7.	NIAS SELATAN	72.48%
8.	SAMOSIR	71.36%
9.	DAIRI	70.73%
10.	BINJAI	69.14%
11.	TAPANULI TENGAH	69.11%
12.	HUMBANG HASUNDUTAN	68.9%
13.	KARO	68.73%
14.	GUNUNGSITOLI	68.5%
15.	SIMALUNGUN	66.81%
16.	NIAS	65.4%
17.	TAPANULI UTARA	63.94%
18.	NIAS BARAT	62.87%
19.	TANJUNG BALAI	62.67%
20.	SERDANG BEDAGAI	62.03%
21.	PEMATANG SIANTAR	61.56%
22.	ASAHAN	60.96%
23.	MANDAILING NATAL	59.54%
24.	PAKPAK BHARAT	59.41%
25.	LANGKAT	57.8%
26.	TOBA SAMOSIR	57.41%
27.	DELI SERDANG	57.28%
28.	LABUHAN BATU	57.16%
29.	MEDAN	56.98%
30.	BATU BARA	56.94%
31.	PADANGSIDIMPUAN	56.49%
32.	NIAS UTARA	50.42%
33.	PADANG LAWAS	42.86%

1 - 33 / 33

Gambar 3.1. Rekapitulasi login platform rapor pendidikan Desember 2022

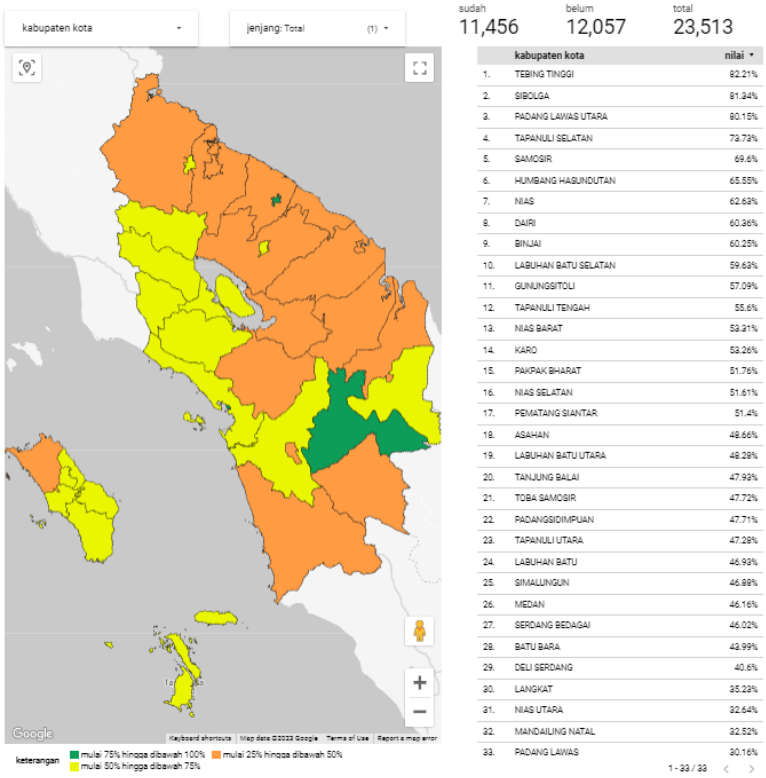

	kabupaten kota	nilai
1.	TEBING TINGGI	82.21%
2.	SIBOLGA	81.34%
3.	PADANG LAWAS UTARA	80.15%
4.	TAPANULI SELATAN	79.73%
5.	SAMOSIR	69.6%
6.	HUMBANG HASUNDUTAN	65.55%
7.	NIAS	62.63%
8.	DAIRI	60.36%
9.	BINJAI	60.25%
10.	LABUHAN BATU SELATAN	59.62%
11.	GUNUNGSITOLI	57.09%
12.	TAPANULI TENGAH	55.6%
13.	NIAS BARAT	53.31%
14.	KARO	53.26%
15.	PAKPAK BHARAT	51.76%
16.	NIAS SELATAN	51.61%
17.	PEMATANG SIANTAR	51.4%
18.	ASAHAN	48.66%
19.	LABUHAN BATU UTARA	48.28%
20.	TANJUNG BALAI	47.93%
21.	TOBA SAMOSIR	47.72%
22.	PADANGSIDIMPUAN	47.71%
23.	TAPANULI UTARA	47.28%
24.	LABUHAN BATU	46.93%
25.	SIMALUNGUN	46.88%
26.	MEDAN	46.16%
27.	SERDANG BEDAGAI	46.02%
28.	BATU BARA	43.99%
29.	DELI SERDANG	40.6%
30.	LANGKAT	35.23%
31.	NIAS UTARA	32.64%
32.	MANDAILING NATAL	32.52%
33.	PADANG LAWAS	30.16%

1 - 33 / 33

Gambar 3.2. Rekapitulasi Eksplorasi Platform Rapor Pendidikan Desember 2022

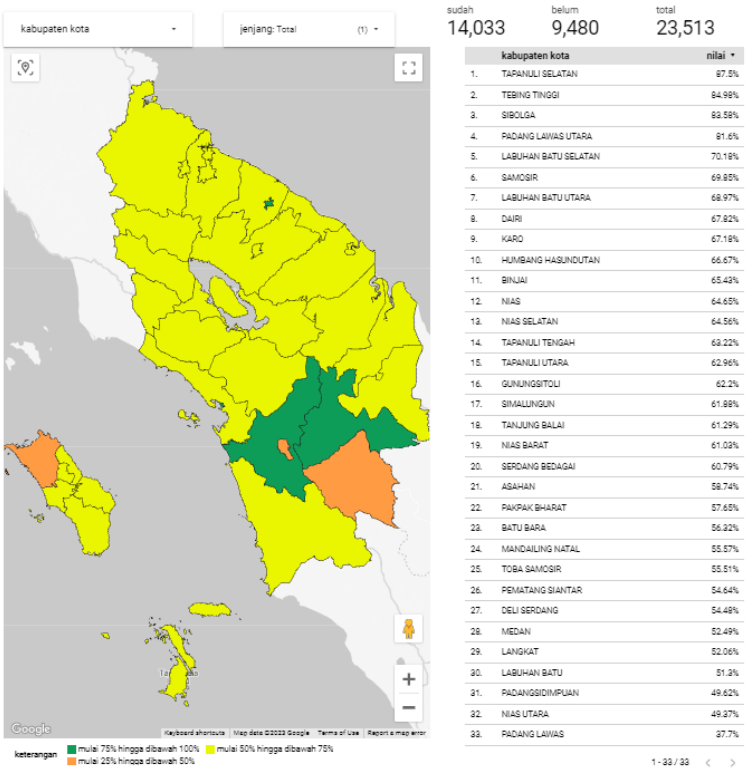

	kabupaten kota	nilai
1.	TAPANULI SELATAN	87.5%
2.	TEBING TINGGI	84.98%
3.	SIBOLGA	83.58%
4.	PADANG LAWAS UTARA	81.6%
5.	LABUHAN BATU SELATAN	70.18%
6.	SAMOSIR	69.85%
7.	LABUHAN BATU UTARA	68.97%
8.	DAIRI	67.82%
9.	KARO	67.18%
10.	HUMBANG HASUNDUTAN	66.67%
11.	BINJAI	65.43%
12.	NIAS	64.65%
13.	NIAS SELATAN	64.56%
14.	TAPANULI TENGAH	63.22%
15.	TAPANULI UTARA	62.96%
16.	GUNUNGSITOLI	62.2%
17.	SIMALUNGUN	61.88%
18.	TANJUNG BALAI	61.29%
19.	NIAS BARAT	61.03%
20.	SERDANG BEDAGAI	60.79%
21.	ASAHAN	58.74%
22.	PAKPAK BHARAT	57.65%
23.	BATU BARA	56.32%
24.	MANDAILING NATAL	55.57%
25.	TOBA SAMOSIR	55.51%
26.	PEMATANG SIANTAR	54.64%
27.	DELI SERDANG	54.48%
28.	MEDAN	52.49%
29.	LANGKAT	52.06%
30.	LABUHAN BATU	51.3%
31.	PADANGSIDIMPUAN	49.62%
32.	NIAS UTARA	49.37%
33.	PADANG LAWAS	37.7%

1 - 33 / 33

Gambar 3.3. Rekapitulasi Unduh Rapor Pendidikan Desember 2022

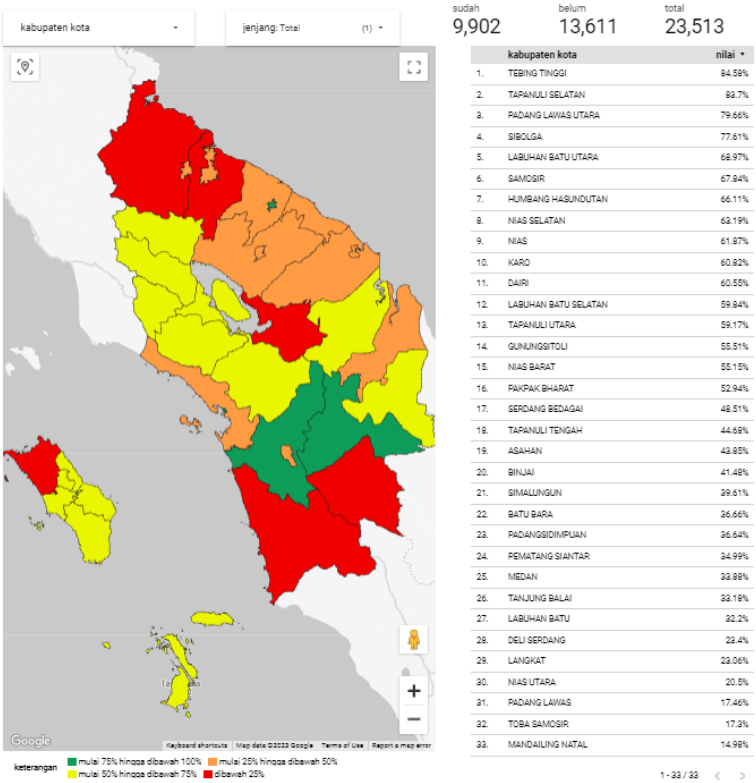

	kabupaten kota	nilai
1.	TEBING TINGGI	84.58%
2.	TAPANULI SELATAN	83.7%
3.	PADANG LAWAS UTARA	79.66%
4.	SIBOLGA	77.61%
5.	LABUHAN BATU UTARA	68.97%
6.	SAMOSIR	67.84%
7.	HUMBANG HASUNDUTAN	66.11%
8.	NIAS SELATAN	63.19%
9.	NIAS	61.87%
10.	KARO	60.82%
11.	DAIRI	60.55%
12.	LABUHAN BATU SELATAN	59.84%
13.	TAPANULI UTARA	59.17%
14.	GUNUNGSITOLI	55.51%
15.	NIAS BARAT	55.15%
16.	PAKPAK BHARAT	52.94%
17.	SERDANG BEDAGAI	48.51%
18.	TAPANULI TENGAH	44.68%
19.	ASAHAN	43.85%
20.	BINJAI	41.48%
21.	SIMALUNGUN	39.61%
22.	BATU BARA	36.66%
23.	PADANGSIDIMPUAN	36.64%
24.	PEMATANG SIANTAR	34.99%
25.	MEDAN	33.98%
26.	TANJUNG BALAI	33.18%
27.	LABUHAN BATU	32.2%
28.	DELI SERDANG	23.4%
29.	LANGKAT	23.06%
30.	NIAS UTARA	20.5%
31.	PADANG LAWAS	17.46%
32.	TOBA SAMOSIR	17.3%
33.	MANDAILING NATAL	14.99%

1 - 33 / 33

Gambar 3.4. Rekapitulasi Unduh Rekomendasi PBD Desember 2022

b. Permasalahan

Rendahnya akses platform rapor pendidikan, dikarenakan :

1) Adanya sekolah yang terletak di daerah pedalaman (3T) belum memiliki akses listrik dan internet sehingga tidak bisa membuka *website* rapor pendidikan;
2) Kepala sekolah tidak memiliki akun belajar id sebagai kunci untuk masuk kedalam aplikasi rapor pendidikan;
3) Masih banyak sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah defenitif;
4) Kepala sekolah belum memahami manfaat dari rapor pendidikan;
5) Kepala sekolah belum mengetahui cara mengakses rapor pendidikan.

c. Langkah Antisipasi Permasalahan

1) Melakukan advokasi kepada dinas pendidikan untuk menghimbau sekolah binaannya untuk mengakses rapor pendidikan melalui PMO yang diadakan setiap bulan;
2) Memberikan bimbingan teknis PBD kepada sekolah tiap jenjang dan tiap daerah;
3) Memberikan penguatan SDM secara internal kelembagaan di BPMP Provinsi Sumatera Utara tentang PBD;
4) Membentuk tim pendamping (koordinator) daerah di BPMP Provinsi Sumatera Utara;
5) Memberikan progres capaian akses rapor pendidikan setiap minggu ke dinas pendidikan;
6) Memberikan pendampingan kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk aktivasi akun belajar.id;
7) Melaksanakan bimbingan teknis PBD bagi dinas pendidikan di BPMP Provinsi Sumatera Utara;
8) Melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah untuk mengangkat para lulusan guru penggerak menjadi pengawas sekolah dan kepala sekolah definitif.

3. Implementasi Kurikulum Merdeka

Merdeka Belajar Episode 15 Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar ditindaklanjuti dengan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai bentuk fasilitasi Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditujukan kepada guru, kepala sekolah, dan kepala PKBM dalam mempersiapkan keterlibatannya pada Kurikulum Merdeka.

a. Capaian

Capaian *Login* Platform Merdeka Mengajar per tanggal 26 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Capaian PMM x IKM

1) Capaian Satuan Pendidikan Login IKM x PMM:

Sudah Login		Belum Login		Total
Jumlah Sekolah	Persentase	Jumlah Sekolah	Persentase	
6,400	98.33	109	1.67	6.509

2) Capaian Satuan Pendidikan Aktivasi IKM x PMM :

Status Aktivasi								Total
Belum Memulai Belajar		Belum Lulus Posttest		Belum Mengunggah Aksi Nyata		Sudah Lulus Topik		
Jumlah Sekolah	%	Jumlah Sekolah	%	Jumlah Sekolah	%	Jumlah Sekolah	%	
326	5.09	297	4.64	538	8.41	5.239	81.86	6.400

b. Permasalahan

Rendahnya akses Platform Merdeka Mengajar (PMM), dikarenakan :

1) Adanya sekolah yang terletak di daerah pedalaman (3T) belum memiliki akses listrik dan internet sehingga tidak bisa membuka aplikasi PMM;
2) Kepala sekolah tidak memiliki akun belajar id sebagai kunci untuk masuk kedalam aplikasi PMM;
3) Satuan Pendidikan belum memahami manfaat dari aplikasi PMM;
4) Satuan Pendidikan belum mengetahui cara mengakses aplikasi PMM.

c. Langkah Antisipasi Permasalahan

1) Melakukan advokasi kepada dinas pendidikan untuk menghimbau sekolah binaannya untuk mengakses PMM melalui PMO yang diadakan setiap bulan;
2) Memberikan penguatan SDM secara internal kelembagaan di BPMP Provinsi Sumatera Utara tentang aplikasi PMM;
3) Membentuk tim pendamping (koordinator) daerah di BPMP Provinsi Sumatera Utara;
4) Memberikan progres capaian aktivasi IKM dan PMM setiap minggu ke dinas pendidikan;
5) Memberikan pendampingan kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk aktivasi akun belajar.id.

4. Pelaksanaan Asesmen Nasional

a. Capaian :

Sebanyak 14.897 satuan Pendidikan menjadi sasaran ANBK tahun 2022 dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan Kesetaraan di Provinsi Sumatera Utara.

b. Permasalahan

1) Persiapan sekolah-sekolah untuk melaksanakan Gladi ANBK di Provinsi Sumatera Utara belum dilakukan secara maksimal;
2) Masih banyak proktor sekolah yang tidak memahami prosedur teknis mempersiapkan alat utama dan alat pendukung yang akan dipergunakan pada saat pelaksanaan ANBK Tahun 2022;
3) Sebanyak 310 sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK tidak melaksanakan ANBK di Provinsi Sumatera Utara;
4) Angka Partisipasi (*Participation Rate*) ANBK di Provinsi Sumatera Utara masih tergolong rendah.

c. Langkah Antisipasi Permasalahan

1) Mendorong satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan moda ANBK secara daring;
2) Mendorong satuan pendidikan untuk melakukan Gladi ANBK secara optimal sebagai kesempatan untuk menguji kemampuan teknisi/proktor dan kesiapan alat agar kendala-kendala teknis dalam pelaksanaan ANBK dapat di minimalisir;
3) Peningkatan koordinasi antara BPMP dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mengurangi terjadinya *overlapping* tugas tim teknis antara tim teknis ANBK Dinas Pendidikan dan BPMP;
4) BPMP Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi perlu mengusulkan kembali dibentuknya tim *Helpdesk* di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk pelaksanaan ANBK tahun 2023;

A.2. Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Tata Kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Ketercapaian Sasaran Kegiatan terkait tata kelola ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dimana pada tahun 2021 mendapatkan nilai 76,61 dan meningkat di tahun 2022 menjadi 78,05 dengan predikat BB. Selain itu peningkatan tata kelola juga ditandai dengan peningkatan nilai kinerja anggaran (NKA) dari nilai 94,66 di tahun 2021 menjadi 97,67 di tahun 2022.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Definisi :

Predikat penilaian yang dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Metode Penghitungan :

= (30% x Nilai Perencanaan Kinerja) + (30% x Nilai Pengukuran Kinerja) + (15% x Nilai Pelaporan Kinerja) + (25% x Nilai Evaluasi Kinerja)

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 2.1

Tahun 2021	Tahun 2022					Tahun 2024 (Akhir Renstra)	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja BPMP dibanding Nasional	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
BB	A	BB	-	-	-	A	-
76,61	80,05	78,05	97,50 %	-	-	82	95,18 %

Grafik 3.1. Capaian Peringkat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara

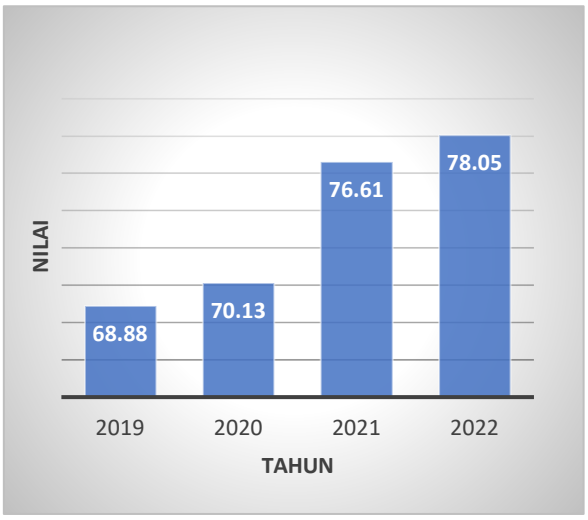

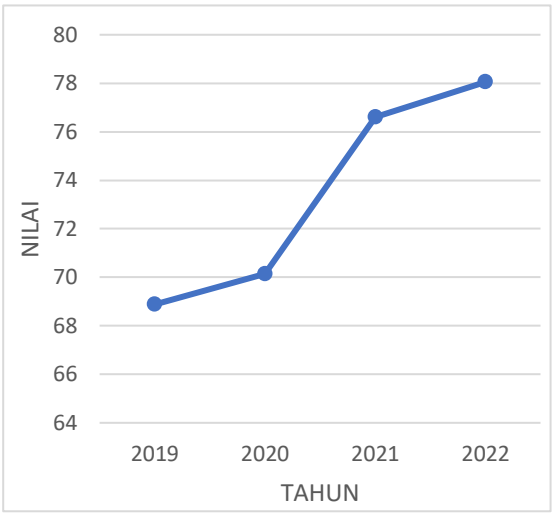

Program dan Kegiatan Pendukung

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 dalam upaya mendukung pencapaian target IKK. 2.1 ini antara lain:

1. Sosialisasi program kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 Mei 2022;
2. Bimbingan Teknis tata naskah dinas, tanggal 17 September 2022;
3. Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi SDM SAKIP tanggal 26 s.d 27 November 2022;
4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja ASN dan penyusunan SKP , tanggal 31 Desember 2022.

a. Permasalahan

1) Belum terdapat dokumen terkait dengan pengukuran kinerja secara berkala;
2) Hasil pengukuran kinerja belum dijadikan dasar untuk pemberian *Reward and Punishment* kepada pegawai/kelompok kerja;
3) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber anggaran;
4) Notula rapat penyusunan Laporan Kinerja t-1 dan rapat pembahasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) belum dibuat;
5) Format laporan kinerja belum mengacu pedoman yang ada yaitu PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

b. Langkah Antisipasi Permasalahan

1) Melengkapi dokumen pendukung berupa hasil pengukuran kinerja berkala, dokumen *reward* dan *punishment*, notula rapat penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022, dan notula terkait pembahasan LHE;
2) Format laporan kinerja dan tata cara reviu laporan kinerja tahun 2022 mengacu kepada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang SAKIP di Kemendikbudristek;
3) Hasil pengukuran kinerja akan menjadi dasar untuk pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai/kelompok kerja untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya;
4) Satuan kerja akan membuat notula rapat penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022;
5) Satuan kerja agar membuat notula rapat pembahasan tindaklanjut LHE;
6) Laporan Kinerja tahun 2022 menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber anggaran.

Indikator Kegiatan 2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Definisi :

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran;
b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi;
c. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran dengan mengukur variabel-variabel capaian *output*, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaraan terhadap perencanaan.

Metode Penghitungan :

Nilai Kinerja Anggaran = (60 % x EKA) + (40 % x IKPA)

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Anggaran

Tahun 2021	Tahun 2022					Tahun 2024 (Akhir Renstra)	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja BPMP dibanding Nasional	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
94,66	83	97,67	117,67	-	-	85	114,91%

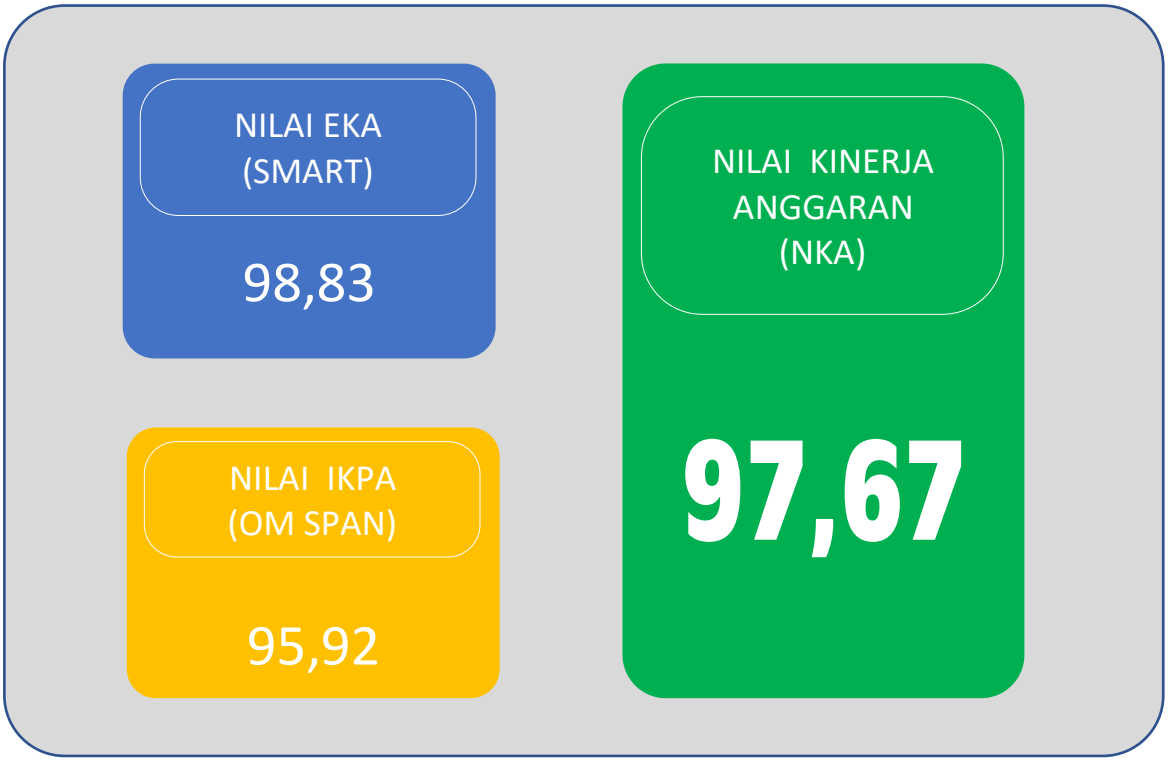

Gambar 3.5. Capaian IKK.2.2

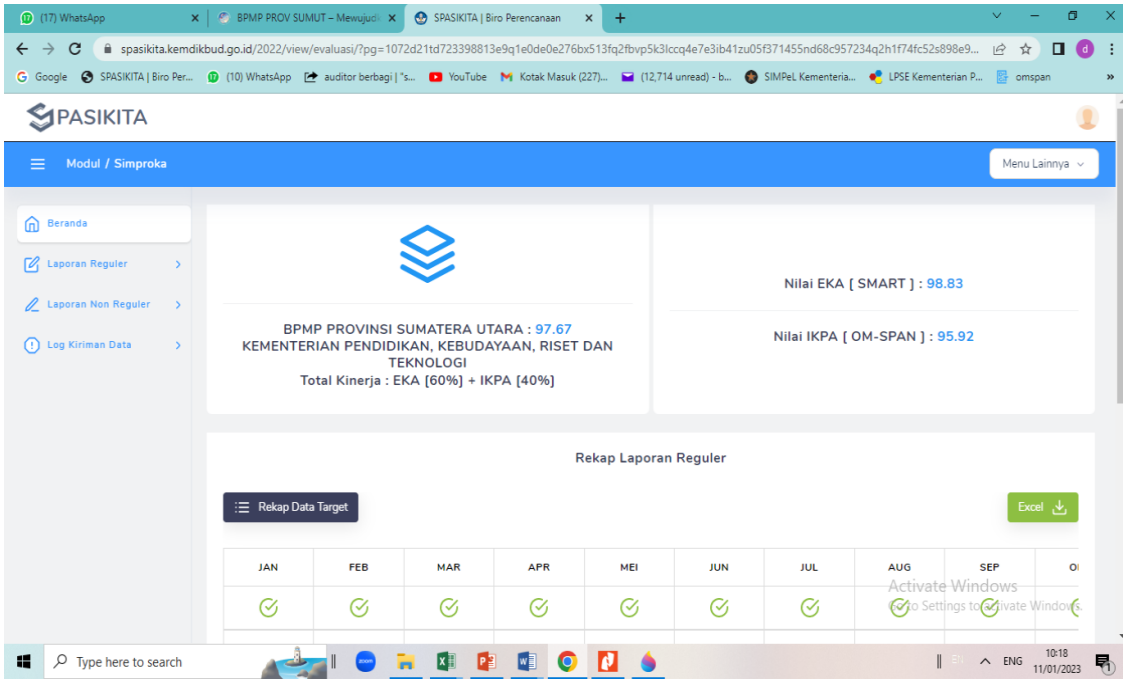

Gambar 3.6. Tangkapan layar Aplikasi Spasikita.

Grafik 3.2. Capaian Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara

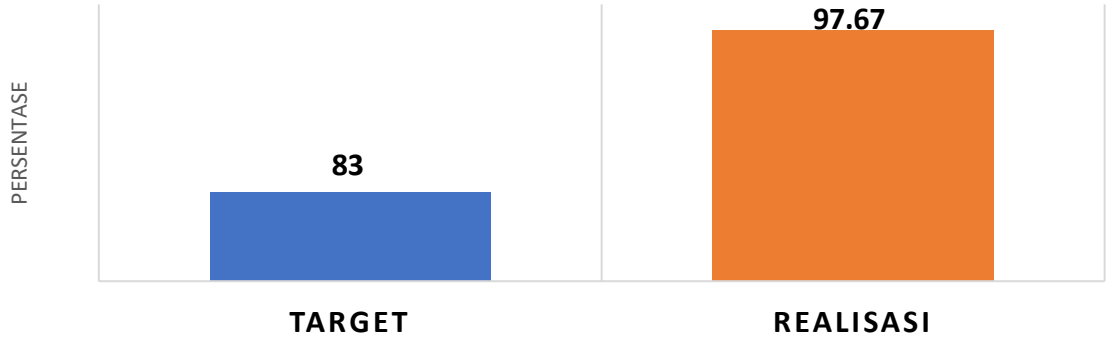

Berdasarkan penilaian dari Kementerian Keuangan yang terhubung melalui aplikasi spasikita dari Kemendikbudristek, nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L untuk tahun 2022 sebesar 97,67. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa target untuk IKK.2.2 telah tercapai dengan sangat baik atau melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 83 tercapai realisasi 97,67, dengan persentase capaian sebesar 117,67%. Capaian realisasi nilai kinerja anggaran sebesar 97,67 diperoleh dari akumulasi nilai EKA sebesar 98,83 dan nilai IKPA sebesar 95,92.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2021, maka capaian tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,01, dari sebelumnya 94,66 menjadi 97,67. Jika dibandingkan

dengan target akhir Renstra (tahun 2024) sebesar 85 maka target yang ditetapkan tersebut telah terlampaui dengan persentase sebesar 117,67%.

Program dan Kegiatan Pendukung

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 dalam upaya mendukung pencapaian target IKK. 1.2 ini antara lain:

1. Membentuk Tim Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk melaksanakan pengendalian atas laporan keuangan;
2. Rapat evaluasi rutin pencapaian kinerja anggaran;
3. Mengikuti bimbingan teknis penilaian PIPK yang diselenggarakan oleh Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen;
4. Membuat peta risiko atas pelaksanaan anggaran;
5. Merevisi halaman III DIPA sesuai dengan jadwal;
6. Menyampaikan laporan capaian kegiatan melalui aplikasi spasikita yang dilaksanakan setiap bulan;
7. Menyampaikan laporan capaian *output* pada aplikasi SAKTI.

a. Faktor Keberhasilan

1) Secara rutin memonitor dan melakukan evaluasi nilai IKPA setiap bulan pada aspek kualitas perencanaan anggaran yang terdiri dari dua indikator yaitu revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA;
2) Secara rutin memonitor dan melakukan evaluasi nilai IKPA setiap bulan pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari lima indikator yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP dan dispensasi SPM;
3) Secara rutin memonitor dan melakukan evaluasi nilai IKPA setiap bulan pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang terdiri dari satu indikator yaitu capaian *output*;
4) Disiplin dalam melakukan input data capaian output di aplikasi SAKTI sebelum melewati batas waktu yang diizinkan yaitu hari kerja ke lima pada setiap bulan.

b. Permasalahan dan Hambatan

1) Terbatasnya jumlah SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai kompetensi dalam perbendaharaan;
2) Belum efektifnya peran SPI dalam pengawasan internal.

c. Langkah Antisipasi Permasalahan

1) Mengikutsertakan SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara pada kegiatan pelatihan pejabat perbendaharaan untuk mendapatkan SDM yang mempunyai kompetensi dan bersertifikat di bidang perbendaharaan;
2) Meningkatkan kompetensi tim SPI agar dapat menjalankan fungsi pengawasan.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp. 34.764.132.000,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 34.196.610.038,- dengan persentase daya serap sebesar 98.37%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian dua sasaran dengan empat indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Grafik 3.3. Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2022

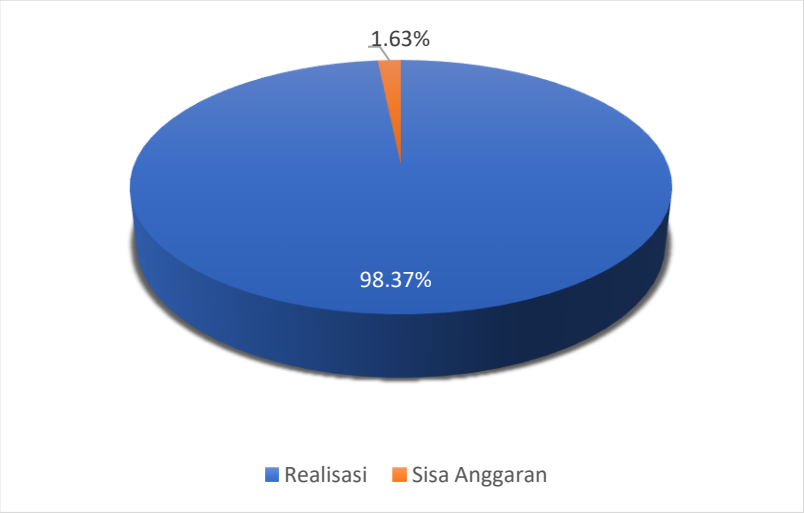

Tabel 3.8.
Alokasi, Realisasi dan Persentase Daya Serap Anggaran

Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Daya Serap
Rp 34.764.132.000	Rp 34.196.610.038	98,37%

Tabel 3.9.
Realisasi Anggaran Perjenis Belanja

Kode	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Daya Serap (%)
51	Belanja Pegawai	11.759.212.000	11.297.625.011	96,07
52	Belanja Barang	22.954.920.000	22.849.575.027	99,54
53	Belanja modal	50.000.000	49.410.000	98,82
57	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0

Grafik 3.4. Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Realisasi Jenis Belanja

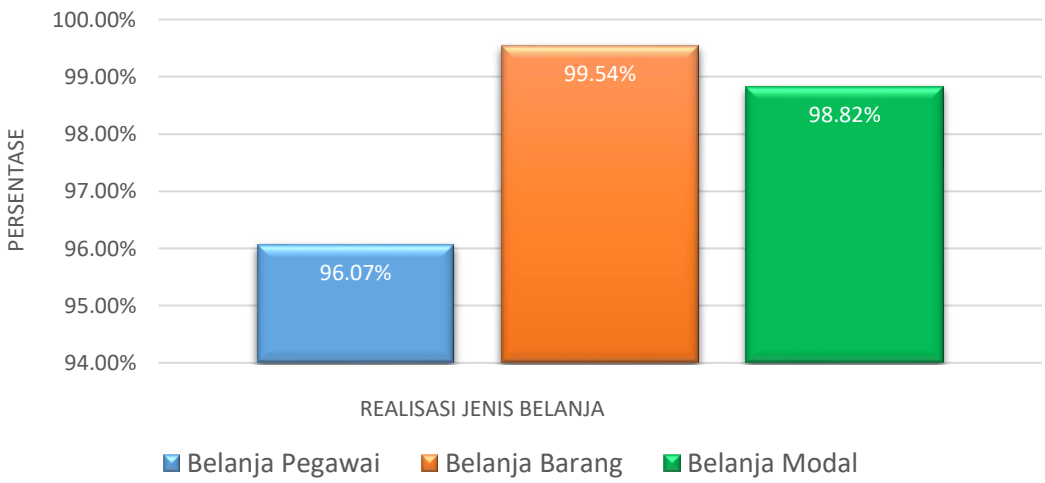

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 899.399.000,-. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari sisa pelaksanaan kegiatan yang telah mencapai target dan perubahan metode pelaksanaan kegiatan dari metode tatap muka secara langsung menjadi jarak jauh dengan strategi daring. Hal ini yang secara langsung mengefisiensi anggaran perjalanan dinas. Efisiensi juga diperoleh dengan adanya perubahan pelayanan yang diberikan, yaitu yang semula pelayanan secara manual diubah dengan memanfaatkan sistem informasi.

Anggaran hasil efisiensi digunakan/dioptimalisasikan kembali untuk memperbanyak volume *output* dari kegiatan dan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian target dari sasaran kegiatan 1 yaitu meningkatnya mutu pendidikan jenjang

PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan juga penguatan kapasitas SDM dengan berbagai kegiatan antara lain :

1. Pendampingan implementasi Dana Alokasi Khusus;
2. Transformasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP;
3. Peningkatan kompetensi SDM SAKIP;
4. Monitoring dan Evaluasi program sekolah sehat melalui revitalisasi UKS;
5. Monitoring dan Evaluasi pencegahan intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan dalam pendidikan.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Cross Cutting/Collaborative*

1. Inovasi

Pada tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan inovasi sebagai berikut:

Gambar 3.7. Inovasi Pelaksanaan Advokasi

Strategi advokasi melalui pendekatan ”IMPRESIF” diterapkan sebagai model pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota/Provinsi.

2. Penghargaan

Pada tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penghargaan :

a. Hasil Advokasi di Kabupaten Pakpak Bharat mendapatkan Penghargaan sebagai Daerah Jawara Belajar.id kategori Kabupaten/Kota;
b. Hasil Advokasi di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan Penghargaan sebagai Daerah Jawara Belajar.id kategori Provinsi.

Gambar 3.8. Penyerahan Penghargaan Anugerah Ki Hajar Tahun 2022

3. Program *Cross Cutting/Collaborative*

Pada tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan program *crosscutting/collaborative* yaitu **Program Sekolah Penggerak.** Pihak-pihak yang berkaitan pada program sekolah penggerak yaitu BPMP Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah dan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen. Adapun peran masing-masing pihak adalah :

a. Peran BPMP Provinsi Sumatera Utara :
   - Melaksanakan advokasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
   - Pendampingan pembuatan video dukungan PSP;
   - Pendampingan penandatanganan Nota Kesepakatan.

b. Peran Pemerintah Daerah :
   - Pembuatan video dukungan PSP;
   - Menandatangani Nota Kesepakatan.

c. Peran Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen :
   - Menandatangani Nota Kesepakatan.

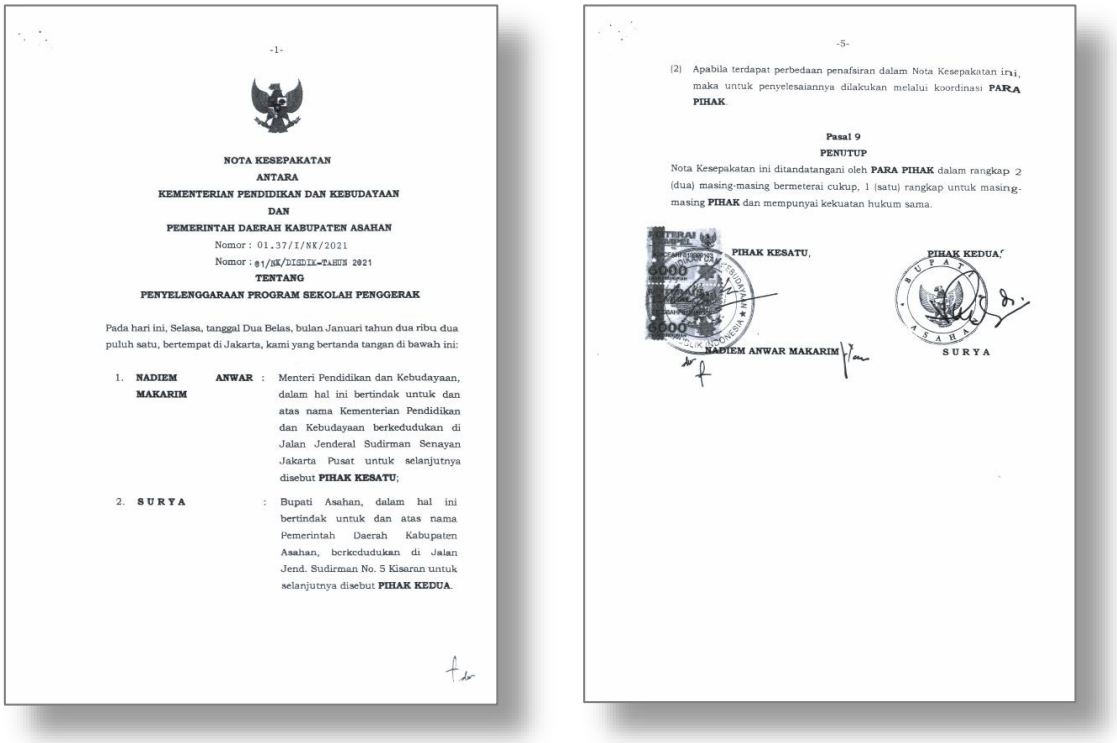

-1-

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN
Nomor : 01.37/I/NK/2021
Nomor : 01/NK/DISDIK-TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NADIEM MAKARIM ANWAR : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. S U R Y A : Bupati Asahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 5 Kisaran untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

-5-

(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepakatan ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing **PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU, **PIHAK KEDUA,**

NADIEM ANWAR MAKARIM S U R Y A

Gambar 3.9. Dokumen Nota Kesepakatan

Dampak dari program *Cross cutting/Collaborative* bagi Program Sekolah Penggerak *:*

- Terlaksananya Program Sekolah Penggerak di seluruh kabupaten/kota;
- Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Sekolah Penggerak.

Laporan Kinerja 2022

BAB IV

PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan Umum Laporan Kinerja

Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara menyajikan pengukuran capaian kinerja dengan berbasis Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2022.

Dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, terdapat satu indikator yang belum mencapai target, yaitu Predikat SAKIP.

Tabel 4.1
Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98	2,12	216,33 %
Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	97,1	388,40 %
Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	A	BB	-
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	83	97,67	117,67 %

Dari segi pengelolaan anggaran, capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Realisasi anggaran sebesar 98,37 % atau sebesar Rp 34.196.610.038 ,- dari pagu total Rp 34.764.132.000,-. Hal ini memperlihatkan koordinasi yang baik antar seluruh unsur dalam organisasi untuk mengoptimalkan capaian daya serap anggaran;
2. Nilai Kinerja Anggaran tahun 2022 sebesar 97,67 memperlihatkan pelaksanaan pengelolaan anggaran masuk kategori penilaian "SANGAT BAIK".

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Evaluasi capaian kinerja belum dilakukan secara berkala.
2. Belum semua rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 ditindaklanjuti.
3. Masih adanya beberapa orang tim SAKIP yang belum maksimal kontribusinya dalam implementasi SAKIP.
4. Informasi yang terdapat dalam Laporan Kinerja 2021 belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
5. Belum berjalannya *reward* dan *punishment* bagi pegawai dan kelompok kerja (Pokja).
6. Belum terdapat inovasi baru di tahun 2022 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi pimpinan atas hasil evaluasi.
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan implementasi SAKIP.
3. Melakukan penguatan dan peningkatan kompetensi tim SAKIP .
4. Pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Menerapkan *reward* dan *punishment* bagi pegawai dan kelompok kerja (Pokja).
6. Melakukan inovasi-inovasi di tahun 2023 yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

Laporan Kinerja 2022

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afrizal Sihotang, S.T., M.Si

Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Medan,28 Maret 2022

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara
Jumeri, S.TP.,M.Si.	**Afrizal Sihotang, S.T., M.Si**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25.00
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	83

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 23.603.916.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 7.969.592.000
		TOTAL	**Rp. 31.573.508.000**

Medan,28 Maret 2022

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Jumeri, S.TP.,M.Si.

Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara

Afrizal Sihotang, S.T., M.Si

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara
Dengan
Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Irwan Safii, M.Pd

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Iwan Syahril, Ph.D.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Medan,14 Juli 2022

Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	**Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara**
Dr. Iwan Syahril, Ph.D.	**Drs. Irwan Safii, M.Pd**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	83

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 23.603.916.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 7.969.592.000
		TOTAL	**Rp. 31.573.508.000**

Medan,14 Juli 2022

Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dr. Iwan Syahril, Ph.D.

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara

Drs. Irwan Safii, M.Pd

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Irwan Safii, M.Pd

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Medan,27 Desember 2022

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,	**Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara,**
Iwan Syahril	**Drs. Irwan Safii, M.Pd**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	83

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas	Rp. 12.752.008.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 22.012.124.000
		TOTAL	**Rp. 34.764.132.000**

Medan,27 Desember 2022

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,

Iwan Syahril

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara,

Drs. Irwan Safii, M.Pd

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA UTARA
Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	0.98	**TW1 :** 0 **TW2 :** 0 **TW3 :** 0 **TW4 :** 0.98	**TW1 :** 0 **TW2 :** 0 **TW3 :** 0 **TW4 :** 2.12	**TW1 :** **Progress / Kegiatan :** **Kendala / Permasalahan :** **Strategi / Tindak Lanjut :** **TW2 :** **Progress / Kegiatan :** **Kendala / Permasalahan :** **Strategi / Tindak Lanjut :** **TW3 :** **Progress / Kegiatan :** Terlaksana kegiatan monitoring dan evaluasi pendidikan anak usia dini. **Kendala / Permasalahan :** Tidak ada kendala dan karena IKK1.1. ini merupakan tugas dan fungsi yang baru bagi BPMP Provinsi Sumatera Utara maka masih dalam proses penyusunan program. **Strategi / Tindak Lanjut :** Menyusun program perencanaan berbasis data bagi satuan PAUD. **TW4 :** **Progress / Kegiatan :** Berdasarkan data akreditasi 2021-2022 (sumber data dari BAN PAUD dan PSKP BSKAP), persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya mencapai 2,12 dari target sebesar 0,98. Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja IKK 1.1 dilaksanakan oleh BP PAUD Dikmas Sumatera Utara dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juli 2022. Selanjutnya berdasarkan Permendikbud nomor 11 tahun 2022 tugas dan fungsi BP PAUD Dikmas dialihkan ke BPMP Provinsi Sumatera Utara.. **Kendala / Permasalahan :** IKK1.1. ini merupakan salah satu tugas dan fungsi yang baru dimulai dari bulan Juli 2022 bagi BPMP Provinsi Sumatera Utara sehingga belum ada kegiatan yang terkait langsung untuk pencapaian target IKK.1.1. **Strategi / Tindak Lanjut :** Menyusun program kegiatan yang mendukung upaya pencapaian target IKK.1.1. agar dapat terlaksana di tahun 2023.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

2	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	25	**TW1 :** 0 **TW2 :** 0 **TW3 :** 0 **TW4 :** 25	**TW1 :** 0 **TW2 :** 0 **TW3 :** 0 **TW4 :** 97.1	**TW1 :** **Progress / Kegiatan :** Kegiatan yang telah terlaksana antara lain : 1. Sosialisasi ke Pemda , program sekolah penggerak angkatan III. 2. Penjaringan Komitmen Daerah angkatan III. 3. Coaching Clinic ke Pemda. 4. Sosialisasi penerapan kurikulum merdeka. 5. Persiapan Penyusunan Indikator Mutu Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 **Kendala / Permasalahan :** Kendala yang dihadapi antara lain : 1. Pada kegiatan penjaringan komitmen daerah, terdapat beberapa Kepala Daerah yang belum bersedia menandatangani nota kesepahaman dengan alasan keberatan atas beberapa klausul pada nota kesepahaman. 2. Pada kegiatan sosialisasi penerapan kurikulum merdeka, masih banyak daerah yang belum cukup menerima informasi kebijakan ini, sehingga pada saat sosialisasi, banyak Kepala Sekolah yang keberatan dalam menerapkan kurikulum merdeka. **Strategi / Tindak Lanjut :** 1. Dilakukan komunikasi yang lebih intens kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk dapat diteruskan kepada Kepala Daerah agar bisa memahami maksud dari nota kesepahaman pada program sekolah penggerak. 2. Perlu dilakukan kembali sosialisasi penerapan Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah-sekolah serta melakukan pendampingan kepada sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka. **TW2 :** **Progress / Kegiatan :** Pada bulan Mei terlaksana kegiatan sosialisasi penerapan kurikulum merdeka di 33 kabupaten/kota dan kegiatan input data IKUR pada e-rakortek; Pada bulan Juni terlaksana 5 kegiatan antara lain ; 1. Advokasi tim PMO kab/kota; 2. Pertemuan periodik PMO; 3. Forum pemangku kepentingan daerah; 4. Sosialisasi akun belajar.id; 5. Monev PPDB. 1. Program Sekolah Penggerak : Status aktivasi akun belajar.Id di PSP angkatan I mencapai 59% dan di PSP angkatan II mencapai 33,8%, FPKD di 6 kabupaten/kota pelasana PSP angkatan I juga terlaksana dengan baik. Saat ini sedang dilakukan persiapan untuk proses pemeringkatan dan rapat pleno kelulusan PSP; 2. Implementasi Kurikulum Merdeka : Jumlah sekolah yang login ke PMM per tanggal 29 Juni 2022 masih berkisar 32,80% dimana dari 5.993 sekolah yg melaksanakan IKM terdapat 1.966 yang login PMM selanjutnya terdapat 39 Komunitas Belajar; 3. Pokja Manajemen Operasional: Pada umumnya Pokja Manajemen Operasional telah terlaksana dengan baik, namun pelaksanaannya tidak begitu efektif karena dilakukan secara daring; 4. Perencanaan Berbasis Data : Dari 11.890 satuan pendidikan terdapat 3.244 yang mengakses platform rapor pendidikan . Dari 33 Dinas Kabupaten/Kota, terdapat 29 yang telah mengakses platform rapor pendidikan . **Kendala / Permasalahan :** Masih banyak operator Bappeda yang belum input data erakortek; Kegiatan pertemuan periodik PMO secara daring sering terkendala karena kesibukan atau juga kekurangperhatian dari pejabat di Dinas Kabupaten/Kota terkait. 1. Program Sekolah Penggerak : Aktivasi akun belajar.Id relatif masih rendah. 2. Implementasi Kurikulum Merdeka : Jumlah sekolah yang login ke PMM relatif masih rendah. 3. Pokja Manajemen Operasional : Pelaksanaan PMO belum efektif karena masih dilakukan secara daring. 4. Perencanaan Berbasis Data : Jumlah satuan pendidikan yang mengakses platform rapor pendidikan relatif masih rendah. **Strategi / Tindak Lanjut :** Perlu dilakukan kegiatan pertemuan periodik PMO secara tatap muka di semua kabupaten/kota untuk lebih terjalinnya kerja sama antara BPMP dengan Dinas Kabupaten/Kota. 1. Program Sekolah Penggerak : Akan dilakukan sosialisasi kembali untuk peningkatan aktivasi akun belajar.Id pada kegiatan Focuss Group Discussin (FGD). 2. Implementasi Kurikulum Merdeka : Akan dilakukan sosialisasi pada kegiatan FGD. 3. Pokja Manajemen Operasional : Akan dilakukan sosialisasi pada kegiatan FGD. 4. Perencanaan Berbasis Data : Akan dilakukan sosialisasi pada kegiatan FGD **TW3 :** **Progress / Kegiatan :** Pada bulan Juli terlaksana kegiatan sebagai berikut : Pemeringkatan Program Sekolah Penggerak Angkatan 3, Pleno Berita Acara Program Sekolah Penggerak Angkatan 3, Pertemuan periodik PMO, Forum Pemangku Kepentingan Daerah (FPKD), Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP, Forum Diskusi Kelompok Terpumpun Program Prioritas Kemendikbudristek Di Kab./Kota, Kunjungan Kerja Pimpinan Terkait Implementasi Kurikulum Merdeka, Pada bulan Agustus terlaksana kegiatan sebagai berikut : Persiapan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Asesmen Nasional, Pertemuan periodik PMO, Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data, Bimtek platform rapor pendidikan, Pendampingan pelaksanaan sosialisasi DAK, Kunjungan Kerja Pimpinan Terkait Implementasi Kurikulum Merdeka, Pertemuan Periodik PMO. Pada bulan September terlaksana kegiatan Persiapan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Asesmen Nasional, Pelaksanaan pendampingan Pemerintah Daerah dalam penentuan status pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan, Pelaksanaan pendampingan Pemerintah Daerah dalam penentuan distribusi sekolah menumpang di satuan pendidikan, Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan simulasi Asesmen Nasional, Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data. **Kendala / Permasalahan :** Jumlah sekolah login PMM sudah mencapai 95% namun masih perlu ditingkatkan untuk capaian penyelesaian topik di PMM. Status Dinas pendidikan kab/kota yang mengakses platform rapor pendidikan telah mencapai 100%, namun untuk sekolah masih 72,88% **Strategi / Tindak Lanjut :** Untuk meningkatkan capaian program prioritas kemendikbudristek akan dijadwalkan kegiatan PMP di bulan Oktober secara luring. Pada kegiatan PMO ini akan mencakup PMO PSP di pagi hari dan dilanjutkan dengan PMO IKM yang di siang harinya. **TW4 :** **Progress / Kegiatan :** Berdasarkan data akreditasi 2021-2022 (sumber data dari BAN PAUD dan PSKP BSKAP), terdapat 33 dari 34 provinsi dan kab/kota yang mengalami kenaikan mutu pembelajaran ditinjau dari aspek akreditasi. Dengan demikian persentase provinsi dan kab/kota yang meningkat akreditasinya (Dikdas dan Dikmen) mencapai 97,1% dari target sebesar 25%. Selanjutnya dalam upaya mendukung program prioritas kemendikbudristek terdapat progres yang cukup signifikan berdasarkan data per 26 Desember 2022 antara lain ; 1. Aktivasi akun belajar.id 79,46%; 2. Login PMM 98,33%; 3. Selesai topik 81,86%; 4. Login rapor pendidikan 61,00%; 5. Unduh rapor pendidikan 57,37%; 6. Eksplorasi PBD 45,92%; 7. Unduh rekomendasi PBD 37,60%; Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja IKK 1.2 antara lain : Program Sekolah Penggerak, Pertemuan periodik PMO, Forum Pemangku Kepentingan Daerah (FPKD), Forum Diskusi Kelompok Terpumpun, Kunjungan Kerja Pimpinan Terkait Program Prioritas Kemendikbudristek, Pendampingan oleh Konsultan, Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data, Bimtek platform rapor pendidikan, Pendampingan pelaksanaan sosialisasi DAK. **Kendala / Permasalahan :** 1. Kegiatan pertemuan PMO tidak maksimal kebermanfaatannya jika dilakukan secara daring; 2. Kegiatan advokasi oleh 3 orang Konsultan BPMP belum sinergi dengan penanggung jawab kabupaten/kota; 3. Masih banyak SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara yang belum menguasai program prioritas kemendikbudristek sehingga tidak maksimal ketika berkoordinasi dengan pemerintah daerah; 4. Belum maksimalnya sinergi antara program/kegiatan BPMP dengan BBGP. **Strategi / Tindak Lanjut :** 1. Dibuat program untuk tahun 2023 pelaksanaan pertemuan PMO akan dilakukan secara luring pada setiap bulan; 2. Kegiatan advokasi oleh 3 Konsultan BPMP akan dilakukan secara terkoordinasi dan bersinergi dengan Penanggung Jawab kabupaten/kota; 3. Akan dilakukan peningkatan kapasitas SDM BPMP, khususnya terkait dengan program prioritas Kemendikbudristek; 4. Meningkatkan kerja sama dan sinergitas antara BPMP dengan BBGP.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Predikat	A	**TW1 :** - **TW2 :** - **TW3 :** - **TW4 :** A	**TW1 :** - **TW2 :** - **TW3 :** 0 **TW4 :** BB	**TW1 :** **Progress / Kegiatan :** 1. Menyiapkan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. 2. Menyiapkan revisi dokumen perencanaan antara lain revisi Renstra 2020-2024 untuk menyesuaikan dengan revisi Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. **Kendala / Permasalahan :** 1. Terdapat kesalahan penulisan target dalam rencana aksi per tanggal 19 April 2022 sehingga dilakukan edit rencana aksi per tanggal 20 Mei 2022. 2. Revisi Renstra masih dalam pembahasan dan belum terselesaikan. **Strategi / Tindak Lanjut :** Segera menyelesaikan reviu dan revisi Renstra 2020-2024 menyesuaikan dengan tugas dan fungsi BPMP dan renstra kemendikbudristek yang telah direvisi. **TW2 :** **Progress / Kegiatan :** 1. Telah terlaksana kegiatan internalisasi program BPMP, dimana pada kegiatan ini dilakukan juga sosialisasi Perjanjian Kinerja; 2. Telah terlaksana penyusunan rencana aksi dan pengukuran kinerja; 3. Upaya peningkatan kompetensi SDM dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat implementasi SAKIP. **Kendala / Permasalahan :** 1. Belum ada IKK terkait dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga penyusunan SKP pegawai belum dapat dilakukan; 2. Penanggung jawab kegiatan belum terbiasa dan belum tepat waktu dalam melakukan pengukuran kinerja . **Strategi / Tindak Lanjut :** Perlu dilakukan sosialisasi terkait pengukuran kinerja, sehingga menjadi budaya dalam organisasi dan akhirnya semua kegiatan bisa terukur capaiannya. **TW3 :** **Progress / Kegiatan :** Kegiatan terkait SAKIP. Telah dilaksanakan kegiatan kegiatan sebagai berikut : • Pengukuran kinerja bulan Juli, Agustus dan September • Rapat evaluasi capaian kinerja • revisi renstra terkait perubahan nomenklatur lembaga. **Kendala / Permasalahan :** • Pada rapat evaluasi capaian kinerja belum dibuatkan notula rapat yang sesuai dengan permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 • Pada setiap rapat evaluasi capaian kinerja belum dibuat rekomendasi dari pimpinan dan tindak lanjutnya. • Hasil Revisi Renstra masih perlu perbaikan-perbaikan. **Strategi / Tindak Lanjut :** • Notula rapat akan di buat sesuai format yang ada di permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 • Pada setiap rapat evaluasi capaian kinerja akan dibuat rekomendasi pimpinan, untuk selanjutnya disosialisasikan dan ditindaklanjuti. • Renstra Revisi akan direviu kembali. **TW4 :** **Progress / Kegiatan :** Nilai SAKIP BPMP provinsi Sumatera Utara tahun 2022 mencapai nilai 78,05 atau meraih predikat BB. Hal ini berarti belum mencapai target meraih predikat A. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan kegiatan yang mendukung upaya peningkatan nilai SAKIP antara lain : • Pengukuran kinerja pada setiap awal bulan; • Rapat evaluasi capaian kinerja pada minggu ke 2 setiap bulan; • Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM yang menangani SAKIP. **Kendala / Permasalahan :** • Pada rapat evaluasi capaian kinerja belum dibuatkan notula rapat yang sesuai dengan permendikbud Nomor 3 Tahun 2021; • Pada setiap rapat evaluasi capaian kinerja belum dibuat rekomendasi dari pimpinan dan tindak lanjutnya; **Strategi / Tindak Lanjut :** • Notula rapat akan di buat sesuai format yang ada di permendikbud Nomor 3 Tahun 2021; • Pada setiap rapat evaluasi capaian kinerja akan dibuat rekomendasi pimpinan, untuk selanjutnya disosialisasikan dan ditindaklanjuti.
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Nilai	83	**TW1 :** 0 **TW2 :** 0 **TW3 :** 0 **TW4 :** 83	**TW1 :** 0 **TW2 :** 0 **TW3 :** 0 **TW4 :** 97.67	**TW1 :** **Progress / Kegiatan :** Daya serap sampai dengan triwulan I mencapai 24,99 %. **Kendala / Permasalahan :** Operator aplikasi SAKTI masih sering melakukan kesalahan pada penginputan data, hal ini dikarenakan aplikasi SAKTI masih baru diluncurkan. **Strategi / Tindak Lanjut :** Melakukan usaha peningkatan kompetensi pada operator aplikasi SAKTI, baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri melalui Youtube. **TW2 :** **Progress / Kegiatan :** Daya serap anggaran sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai 38,43%. Nilai IKPA di bulan Juni mencapai nilai 84,64. Dimana nilai kualitas perencanaan anggaran = 92,98 Nilai Kualitas pelaksanaan anggaran = 88,95 dan Nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran = 78,38 . Beberapa indikator perlu mendapat perhatian karena nilainya masih dibawah 80 yaitu penyerapan anggaran = 69,75 penyelesaian tagihan = 75,00 dan capaian output= 78,38. **Kendala / Permasalahan :** 1. Proses administrasi perubahan pejabat perbendaharaan, nomenklatur satker dan rekening satker berpengaruh pada proses penyiapan dana kegiatan; 2. Beberapa kegiatan masih dilakukan secara daring , seperti PMO dan sosialisasi akun belajar.Id. **Strategi / Tindak Lanjut :** 1. Segera menyelesaikan proses administrasi perubahan pejabat perbendaharaan, nomenklatur satker dan rekening satker; 2. Melaksanakan kegiatan secara luring agar lebih efektif ; 3. Melaksanakan review jadwal kegiatan sampai dengan Desember 2022. **TW3 :** **Progress / Kegiatan :** Nilai IKPA pada bulan Juli, Agustus dan September adalah sebagai berikut : Juli = 87,55 Agustus = 91,91 September = 94,09 Daya serap pada bulan Juli, Agustus dan September adalah sebagai berikut : Per 31 Juli 2022 = 48,42% Per 31 Agustus 2022 = 58,37% Per 30 September 2022 = 66,1% **Kendala / Permasalahan :** Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti, nilai IKPA pada periode triwulan III mengalami peningkatan pada setiap bulannya dan daya serap anggaran tidak jauh berbeda dengan target penyerapan anggaran . **Strategi / Tindak Lanjut :** Mempertahankan nilai yang ada dengan cara disiplin dalam mematuhi ketentuan yang ada pada aspek-aspek penilaian IKPA dan melaporkan capaian output pada aplikasi SAKTI. **TW4 :** **Progress / Kegiatan :** Nilai IKPA = 95,92 dan nilai EKA =98,83. Dengan demikian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara mencapai 97,67 dari target senilai 83. **Kendala / Permasalahan :** Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti, nilai IKPA mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. **Strategi / Tindak Lanjut :** Mempertahankan nilai yang ada dengan cara disiplin dalam mematuhi ketentuan yang ada pada aspek-aspek penilaian IKPA dan melaporkan capaian output pada aplikasi SAKTI.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	**Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya**	**522.0000**	**Lembaga**	17	63	304	583	**Rp. 12.752.008.000**
2	[063] Pendampingan Fasilitasi Berdasarkan SNP			3	10	30	45	Rp. 12.478.081.000
3	[084] Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan			0	0	1	6	Rp. 273.927.000
4	**Layanan Umum**	**1.0000**	**Layanan**	1	1	1	1	**Rp. 375.000.000**
5	[055] Pelayanan Umum Rumah Tangga dan Perlengkapan			3	6	9	12	Rp. 375.000.000
6	**Layanan Perkantoran**	**1.0000**	**Layanan**	1	1	1	2	**Rp. 21.587.124.000**
7	[001] Gaji dan Tunjangan			3	6	9	12	Rp. 11.759.212.000
8	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3	6	9	12	Rp. 9.827.912.000
9	**Layanan Sarana Internal**	**1.0000**	**Unit**	1	1	1	1	**Rp. 50.000.000**
10	[997] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			0	3	3	3	Rp. 50.000.000
							TOTAL JUMLAH PAGU	**Rp. 34.764.132.000**

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Medan,17 Januari 2023

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara,

Drs. Irwan Safii, M.Pd

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Bunga Raya No. 96 Asam Kumbang, Pos Sunggal – Medan
Telepon : (061) 8222372 Laman : https://lpmp-sumut.kemdikbud.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Medan, 27 Januari 2023
Ketua Tim Pereviu,

Ajizah Siregar, M.Pd
NIP. 196910101991032003